

**KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Studi Kasus pada Pemerintah Kota Magelang

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Oleh:

Aprilia Wulansari

NIM: 032114092

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2008

**KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Studi Kasus pada Pemerintah Kota Magelang

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Oleh:

Aprilia Wulansari

NIM: 032114092

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2008

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH**

Studi Kasus pada Pemerintah Kota Magelang

Oleh:

Aprilia Wulansari

NIM: 032114092

Telah Disetujui oleh:



Pembimbing I

Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.

Tanggal: 15 Juli 2008

Pembimbing II

MT Ernawati, S.E., M.A

Tanggal: 29 Juli 2008

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH
Studi Kasus pada Pemerintah Kota Magelang

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Aprilia Wulansari

NIM: 032114092

Telah dipertahankan di depan Dewan penguji

Pada Tanggal 29 Agustus 2008

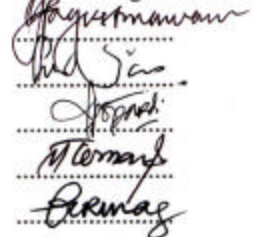
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap

Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.,
Anggota	MT Ernawati, S.E., M.A.
Anggota	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.

Tanda Tangan

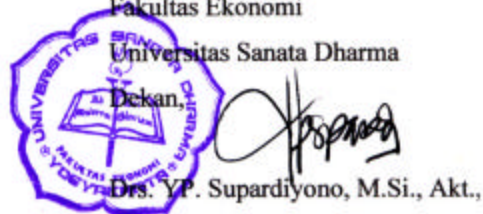


Yogyakarta, 30 Agustus 2008

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan,


Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.,



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya
(Markus 9:23)

World will give you everything that you fight to it just if you have
paid it price
(Napoleon Hill)

Hanya orang-orang sukseslah yang dapat membahagiakan orang-orang
yang dicintainya

Sukses atau gagal bukanlah takdir melainkan pilihan dan keputusan

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Tuhan Yesus Kristus

Bunda Maria Tercinta

Santa Gicilia Pelindungku

Kedua Orang Tuaku yang telah memberikan teladan buat hidupku

Mas Gatot, Mbak Vita, Mas Noni, dan Kepenakanku Ketrin

Kekasihku Tersayang "Mas Bowok"

*Terima kasih atas doa, dukungan dan cinta yang sudah tercurah untuk menyelesaikan
skripsiku.....*



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:
**“KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH” (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Magelang)** dan dimajukan
untuk diuji pada tanggal 29 Agustus 2008 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini
tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan
cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang
menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku
seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau
keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain
tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak,
dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan
saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan
menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri,
berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 31 Juli 2008
Yang membuat pernyataan,



APRILIA WULANSARI

ABSTRAK

KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH Studi Kasus pada Pemerintah Kota Magelang

Aprilia Wulansari
NIM: 032114092
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2008

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui (1) Besar kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2007, (2) Perkembangan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2007.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa (1) Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang sebesar 10,80% pada tahun 2000; 9,11% pada tahun 2001; 9,10% pada tahun 2002; 9,19% pada tahun 2003; 11,09% pada tahun 2004, merupakan kontribusi terbesar; 9,31% pada tahun 2005; kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2006 sebesar 7,59% dan pada tahun 2007 sebesar 8,88% (2) Hasil uji signifikansi menggunakan pengujian statistik uji t menunjukkan bahwa $t_{hitung} -1,375 < t_{tabel} 2,447$, hal ini membuktikan bahwa tidak ada perkembangan yang signifikan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2007.

ABSTRACT

CONTRIBUTION OF TAX PUBLIC LIGHTING TO REGIONAL ORIGINAL REVENUE

A Case Study in Magelang Municipality Government

Aprilia Wulansari
032114092
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2008

The research was aimed to (1) find out how much the contribution of tax public lighting to Regional Original Revenue in Magelang municipality during 2000 to 2007, (2) find out the significant development of contribution of tax public lighting to Regional Original Revenue in Magelang municipality during 2000 to 2007.

This study was a case study. The data were obtained by documentation. The data analysis of this study was the Simple Linear Regression analysis.

The result showed that (1) the contribution of tax public lighting to Regional Original Revenue in Magelang municipality was equal to 10,80% in 2000; 9,11% in 2001; 9,10% in 2002; 9,19% in 2003; 11,09% in 2004; 9,31% in 2005; 7,59% in 2006; and 8,88% in 2007, (2) the result of “t” test showed that calculated $t = -1,375 < 2,447$, this result proved that there was no significant development of contribution of tax public lighting to Regional Original Revenue in Magelang municipality during 2000 to 2007.

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : Aprilia Wulansari

Nomor Mahasiswa : 032114092

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

”KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH”.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 31 Juli 2008

Yang menyatakan



APRILIA WULANSARI

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- a. Romo Dr. Ir. P. Wiryono Priyotamtama, S.J., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma.
- b. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt. selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma sekaligus Pembimbing I yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- c. MT Ernawati, S.E., M.A selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- d. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah memberikan disiplin ilmu selama penulis kuliah, seluruh staf administrasi, sekretariat Fakultas Ekonomi dan UPT perpustakaan.

- e. Bapak Udin selaku pegawai Pemerintah Kota Magelang yang telah banyak membantu dalam pencarian data yang penulis butuhkan.
- f. Orangtuaku tercinta Bapak J.D Panut dan Ibu Wahyuni yang telah membesarkan, membiayai, mendoakan dan memberi dorongan serta kasih sayang kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan lancar.
- g. Mbak Vita, Mas Noni, Mas Gatot dan keponakanku tersayang “Ketrin” yang selalu membuatku tersenyum lagi.
- h. Anak-anak kos “DIVA” : Molly, Ketut, Tina, Putri, Michelle, Opie, Erni, Ina, Embex, Maria, Nana terima kasih selama ini sudah menjadi temanku.
- i. Heru yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini.
- j. Teman-teman Akuntansi angkatan 2003 khususnya kelas C : Wiwid, Riky, Angga, Wiji, Inez, Desy, Stasia, Risma, Rina, Lia, Vita, Tata, Betty, Titi, Mais, Daniel, Ririn, Risma.
- k. Buat sahabat tercinta “SiJum”, terima kasih atas dukungannya.
- l. Buat sobatku Riza, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.
- m. Anak-anak kelas MPT : Mbak Memes, Mbak Reni, Eka, Endar, Niken, Tifani, Wita, Novel, terima kasih atas saran dan masukannya.
- n. Teman-teman KKP : Neko, Pak de Dadang, Mas Natan, Mbak Luccy, Lisa, Riky, Pak Lurah, terima kasih atas persahabatannya.
- o. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 31 Juli 2008

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Aprilia', with a stylized flourish at the end.

APRILIA WULANSARI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO dan PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Sistematika penulisan.....	5

BAB II	LANDASAN TEORI.....	7
A.	Otonomi Daerah.....	7
1.	Pengertian Otonomi Daerah.....	7
2.	Tujuan Otonomi Daerah.....	7
B.	Penerimaan Daerah.....	8
1.	Pengertian Pendapatan Daerah.....	8
2.	Sumber-sumber Pendapatan Daerah.....	8
3.	Pengertian Pembiayaan.....	10
4.	Sumber-sumber Pembiayaan.....	10
C.	Pendapatan Asli Daerah.....	10
1.	Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	10
2.	Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.....	10
D.	Pajak.....	11
E.	Pajak Daerah.....	12
1.	Pengertian Pajak Daerah.....	12
2.	Jenis-jenis Pajak Daerah.....	12
F.	Pajak Penerangan Jalan.....	13
1.	Pengertian Penerangan Jalan.....	13
2.	Pengertian Pajak Penerangan Jalan.....	13
3.	Subjek dan wajib Pajak Penerangan Jalan	14
4.	Objek Pajak Penerangan Jalan.....	14

5. Dasar Pengenaan PPJ.....	15
6. Tarif Pajak Penerangan Jalan.....	15
G. Hasil Penelitian Terdahulu.....	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
A. Jenis Penelitian.....	18
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	18
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	18
D. Data yang diperlukan	19
E. Teknik Pengumpulan Data.....	19
F. Teknis Analisis Data.....	19
BAB IV GAMBARAN UMUM	24
A. Sejarah Kota Magelang.....	24
B. Pemerintah.....	27
C. Pendidikan.....	28
D. Kesehatan.....	28
E. Agama.....	29
F. Keadaan Geografi.....	30
G. Pertanian, Perikanan, dan Peternakan.....	32
H. PAD Kota Magelang.....	33
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Deskripsi Data.....	35
B. Kontribusi PPJ terhadap PAD.....	36

C. Perkembangan Kontribusi PPJ terhadap PAD.....	40
D. Pembahasan.....	44
BAB VI PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Keterbatasan Penelitian.....	51
C. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN.....	54

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1: Rencana tabel Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD).....	20
Tabel 2: Rencana perhitungan trend dari kontribusi PPJ.....	21
Tabel 3: Realisasi PPJ tahun 2000-2007.....	35
Tabel 4: Realisasi PAD tahun 2000-2007.....	36
Tabel 5: Kontribusi PPJ terhadap PAD.....	39
Tabel 6: Perhitungan trend dari kontribusi PPJ.....	40
Tabel 7: Perhitungan uji “t”.....	41

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1: Contoh Bagan Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0	22
Gambar 2: Daerah penerimaan dan penolakan H_0	43

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah membawa implikasi luas pada roda pemerintahan di daerah. Melalui Undang-Undang ini pula banyak jenis wewenang yang dialihkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Prinsip yang mendasari kewenangan tersebut adalah diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Tujuan utama diberlakukannya otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah. Hal yang sangat berperan penting dalam menunjang keberhasilan daerah adalah masalah sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Sejalan dengan semakin pesatnya pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta usaha meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan sumber-sumber pembiayaan maupun pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah terbesar yang berasal dari dalam wilayahnya sendiri, salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 sumber-sumber PAD berasal dari Pajak daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah.

Dari sumber-sumber PAD, salah satu sumber yang memiliki potensi cukup tinggi pada adalah sektor Pajak Penerangan Jalan. Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis dari Pajak Daerah. Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Di jaman yang sudah sangat modern seperti sekarang ini manusia khususnya masyarakat Kota Magelang tentunya tidak bisa terlepas dari tenaga listrik, dalam hal ini adalah penerangan jalan. Bagi mereka penerangan jalan dianggap menjadi kebutuhan manusia yang cukup penting khususnya di malam hari. Jika satu saat lampu penerangan jalan di sekitar rumah padam, apalagi jika hingga beberapa hari padamnya, akibatnya bukan cuma gelap sekitar rumah pada malam hari, tetapi bisa juga membuat rasa aman terganggu. Misalnya, tidak bisa mengawasi setiap orang asing yang menuju rumah. Bisa juga daerah gelap seperti itu membuat pejalan kaki sulit melangkahakan kakinya. Artinya, jika lampu penerangan jalan padam, tak cuma keindahan jalan yang berkurang tetapi berbagai macam aspek juga turut terganggu. Hal-hal inilah yang menyebabkan tingkat penggunaan penerangan jalan di Kota Magelang terus meningkat. Dengan

meningkatnya penggunaan penerangan jalan secara otomatis penerimaan Pajak Penerangan Jalan juga akan meningkat.

Dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah, sektor Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sektor andalan dalam menunjang penerimaan Pemerintah Kota Magelang. Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah di Kota Magelang dari tahun 2000 maka perlu dilihat seberapa besar kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan bagaimana perkembangan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007. Jika kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah rendah, sebaiknya ditingkatkan. Akan tetapi jika kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah tinggi, maka harus dipertahankan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2007?
2. Apakah ada perkembangan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2007?

C. Batasan Masalah

Dalam penulisan ini, penulis membatasi masalah yang diteliti untuk Pendapatan Asli Daerah hanya Pajak Penerangan Jalan saja, sehingga tidak dibahas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lain.

D. Tujuan Penelitian

Penulis mengadakan penelitian ini dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2007.
2. Untuk mengetahui apakah ada perkembangan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2007.

E. Manfaat penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

1. Pemerintah Kota Magelang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah, terutama dalam hal penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

2. Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber wacana dan informasi untuk penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa Universitas Sanata Dharma yang berkaitan dengan Pajak Penerangan Jalan.

3. Penulis

Penulis memperoleh wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian, selain itu juga memperoleh pengetahuan di bidang keuangan daerah.

F. Sistematika Penulisan

Peneliti menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang mendukung penelitian, meliputi: pengertian Otonomi Daerah, Tujuan Otonomi Daerah, pengertian Pendapatan Daerah, sumber-sumber Pendapatan Daerah, pengertian Pendapatan Asli Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, pengertian Pajak, pengertian Pajak Daerah, jenis-jenis Pajak Daerah, dan teori yang mendukung tentang Pajak Penerangan Jalan.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.

BAB IV Gambaran Umum Pemerintah Kota Magelang

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum Pemerintah Kota Magelang.

BAB V Deskripsi Data, Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab ini dibahas mengenai deskripsi data dan perhitungan penerimaan daerah dari sektor pajak khususnya Pajak Penerangan Jalan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Perhitungan yang akan dilakukan menggunakan rumus yang telah ditentukan.

BAB VI Penutup

Berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah:

“Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Daerah otonom menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, adalah:

“Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2. Tujuan Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tujuan otonomi daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Penerimaan Daerah

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004, Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.

1. Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

2. Sumber-sumber Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Perimbangan terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

2) Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

3) Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

c. Lain-lain Pendapatan

Lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.

3. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

4. Sumber-sumber Pembiayaan

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
- b. Penerimaan pinjaman daerah
- c. Dana cadangan daerah
- d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

C. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- 1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) jasa giro
- 3) pendapatan bunga
- 4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

D. Pajak

Ada berbagai pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

Menurut Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2003:1) pajak adalah:

“Turun rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Adriani yang dikutip oleh Zain (2003:10-11) pajak adalah:

Iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R yang dikutip oleh Zain (2003:11) pajak adalah:

Suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan

proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

E. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No 34 Tahun 2000, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No 34 Tahun 2000, jenis-jenis Pajak Daerah adalah:

a. Pajak Propinsi

Pajak propinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat propinsi. Pajak propinsi yang berlaku di Indonesia sampai saat ini, terdiri dari:

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

b. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak kabupaten/kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota.

Pajak kabupaten/kota yang berlaku di Indonesia sampai saat ini, terdiri dari:

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak parkir
- 6) Pajak penerangan jalan
- 7) Pajak pengambilan bahan galian golongan C

F. Pajak Penerangan Jalan

1. Pengertian Penerangan Jalan

Menurut Prakosa (2005: 126-127), Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

2. Pajak Penerangan Jalan

Menurut Prakosa (2005: 126), Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

3. Subjek dan Wajib Pajak penerangan Jalan

Menurut Prakosa (2005: 127), Subjek dan wajib Pajak Penerangan Jalan adalah:

- a. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- b. Wajib Pajak penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

4. Objek Pajak Penerangan Jalan

Menurut Prakosa (2005; 127), Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan yang dimaksud jika:

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait
- d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah

5. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

Menurut Prakosa (2005; 127-128), Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Nilai Jual Tenaga Listrik yang dimaksudkan tersebut ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik
- b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan

6. Tarif Pajak Penerangan Jalan

Menurut Prakosa (2005; 128), Tarif Pajak Penerangan Jalan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Soeratno dan Supramono (2002) melakukan penelitian dengan judul “Urgensi Pajak Daerah Dan Penghasilan Daerah Dalam Struktur Pendapatan Asli Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang paling dominan dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya bagi propinsi DIY. (2) Sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan, seluruh kabupaten dan

kota di Propinsi DIY, pajak daerah dan retribusi daerahnya bersifat elastis. (3) Dilihat dari koefisien korelasi dan trend runtun waktu, dapat dikatakan bahwa pemerintah sangat menggantungkan diri pada pajak daerah dan retribusi daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Supramono (2003) melakukan penelitian dengan judul “Posisi Pajak Dan Retribusi Sebagai Sumber Penerimaan daerah Di Kota Semarang”. Dari penelitian yang dilakukan, hasil yang didapat adalah hanya beberapa jenis retribusi saja yang mempunyai posisi prima dan dijadikan andalan sumber penerimaan daerah Kota Semarang. Penerimaan tersebut meliputi: pajak penerangan jalan dan retribusi kebersihan, retribusi terminal dan retribusi pengamanan lingkungan pasar. Sedangkan jenis pajak dan retribusi yang lain masih membutuhkan penanganan ekstra agar mampu dijadikan tumpuan penerimaan daerah di masa datang.

Radianto dan Haning (2005) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Potensi Pajak Daerah Di Kota Yogyakarta”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Potensi efisiensi pajak daerah Kota Yogyakarta mengalami penurunan. Penurunan efisiensi ini terlihat dari tidak tercapainya target yang ditentukan. Kondisi ini disebabkan karena penerapan otonomi daerah terutama desentralisasi fiskal masih dalam jangka pendek sehingga membutuhkan beberapa penyesuaian terutama dalam hal penentuan target pajak daerah. (2) Potensi pertumbuhan pajak daerah Kota Yogyakarta mengalami peningkatan. Walaupun efisiensi menurun, tetapi rata-rata pertumbuhan pajak daerah mengalami kenaikan setelah Undang-

Undang perpajakan Nomor 34 Tahun 2000, terutama untuk pajak hotel, reklame dan penerangan jalan. (3) Potensi kontribusi pajak daerah Kota Yogyakarta sebagian besar mengalami penurunan. (4) Tingkat matriks potensi pajak daerah Kota Yogyakarta sebagian besar stabil.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan termasuk studi kasus, yaitu penelitian tentang suatu objek tertentu. Kesimpulan dari penelitian ini hanya berlaku pada objek yang diteliti.

B. Tempat dan waktu penelitian

1. Tempat : Pemerintah Kota Magelang
2. Waktu : Bulan Juni – Juli 2008

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Magelang.
2. Yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu:
 - a. Realisasi Pajak Penerangan Jalan tahun 2000 sampai dengan tahun 2007
 - b. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2000 sampai dengan tahun 2007

D. Data yang diperlukan

1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Magelang
2. Data realisasi Pajak Penerangan Jalan tahun 2000 sampai dengan tahun 2007
3. Data realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2000 sampai dengan tahun 2007

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data atau catatan tertulis. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai realisasi Pajak Penerangan Jalan dan Pendapatan Asli Daerah.

F. Teknik Analisis Data

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun, rumus yang digunakan (Halim 2002: 345), adalah:

Rencana tabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rencana tabel Kontribusi PPJ terhadap PAD

Tahun Anggaran	Realisasi PPJ (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi %
2000			
2001			
2002			
2003			
2004			
2005			
2006			
2007			

2. Untuk melihat perkembangan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menemukan persamaan trend dengan metode kuadrat terkecil yang ditunjukkan dalam persamaan garis trend $Y' = a + bX$, (Subagyo dan Djarwanto 2005: 259), di mana:

Y' = Nilai variabel yang ditentukan

X = Tahun yang akan dihitung berdasarkan tahun dasar yang akan ditentukan dari $X = 0$

n = jumlah tahun

a = bilangan konstan, yang merupakan titik potong dengan sumbu vertikal pada gambar kalau nilai $X = 0$

b = koefisien kecondongan garis

Tabel 2. Rencana perhitungan trend dari kontribusi PPJ

Tahun	Kontribusi PPJ (%)	X	XY	X ²	Y'
2000					
2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
TOTAL					

nilai a dan b dapat dihitung berdasarkan 2 persamaan berikut ini:

$$\sum Y = Na + b \sum X$$

$$\sum XY = a \sum X + b \sum X^2$$

b. Menguji Hipotesis

1) Merumuskan hipotesis

Hipotesis nihil, $H_0 : b = 0$; berarti tidak ada perkembangan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hipotesis alternatif, $H_1 : b \neq 0$; berarti ada perkembangan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2) Memilih *level of significance* : $\alpha = 0,05$

3) Menghitung nilai t adalah:

Rumus S_b yang digunakan adalah sebagai berikut:

Dimana:

- 4) Menentukan daerah penerimaan dan penolakan H_0

Gambar 1: Contoh Bagan Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0

- 5) Menentukan kriteria pengujian
 - a) H_0 diterima apabila: $-t(a/2;n-2) \leq t_{hit} \leq t(a/2;n-2)$
 - b) H_0 ditolak apabila: $t_{hit} < -t(a/2;n-2)$ atau $t_{hit} > t(a/2;n-2)$
- 6) Menarik kesimpulan dari pengujian di atas yaitu apabila H_0 diterima berarti tidak ada perkembangan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah sedangkan apabila H_0 ditolak maka berarti ada perkembangan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KOTA MAGELANG

Kota Magelang sebelum berkedudukan menjadi Ibukota Karesidenan Kedu juga pernah berkedudukan menjadi Ibukota Kabupaten Magelang. Tetapi setelah masa kemerdekaan kota ini menjadi kotapraja dan kemudian di era reformasi dikenal menjadi Kotamadya Magelang. Namun sejalan dengan pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah, sebutan kotamadya ditiadakan dan diganti menjadi kota. Kotamadya Magelang saat ini terdiri dari 3 kecamatan dan 17 kelurahan. Posisi Kota Magelang sangat strategis karena terletak hampir di tengah Jawa Tengah dan berada di persimpangan poros utama Yogya-Semarang, Yogya-Wonosobo, dan Semarang-Cilacap.

A. Sejarah Kota Magelang

Hari Jadi Kota Magelang ditetapkan pada tanggal 11 April, penetapan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 1989. Penetapan hari jadi Kota Magelang merupakan tindak lanjut dari seminar dan diskusi yang dilaksanakan oleh Panitia Peneliti Hari Jadi Kota Magelang bekerjasama dengan Universitas Tidar Magelang dengan dibantu pakar sejarah dan arkeologi Universitas Gajah Mada, Drs. MM. Soekarto Kartoatmodjo, dengan dilengkapi berbagai penelitian di Museum Nasional.

Kota Magelang mengawali sejarahnya sebagai desa perdikan "*Mantyasih*", yang saat ini dikenal dengan *Kampung Meteseh* di Kelurahan Magelang. Mantyasih sendiri memiliki arti beriman dalam Cinta Kasih. Di kampung Meteseh saat ini terdapat sebuah lumpang batu yang diyakini sebagai tempat upacara penetapan Sima atau Perdikan.

Untuk menelusuri kembali sejarah Kota Magelang, sumber prasasti yang digunakan adalah Prasasti POH, Prasasti GILIKAN dan Prasasti MANTYASIH. Ketiganya merupakan parsasti yang ditulis diatas lempengan tembaga. Parsasti POH dan Mantyasih ditulis pada zaman Mataram Hindu saat pemerintahan Raja Rake Watukura Dyah Balitung (898-910 M), dalam prasasti ini disebut-sebut adanya Desa Mantyasih dan nama Desa Glangglang. Mantyasih inilah yang kemudian berubah menjadi Meteseh, sedangkan Glangglang berubah menjadi Magelang.

Dalam Prasasti Mantyasih berisi antara lain, penyebutan nama Raja Rake Watukura Dyah Balitung, serta penyebutan angka 829 Çaka bulan Çaitra tanggal 11 Paro-Gelap Paringkelan Tungle, Pasaran Umanis hari Senais Sçara atau Sabtu, dengan kata lain Hari Sabtu Legi tanggal 11 April 907. Dalam Prasasti ini disebut pula Desa Mantyasih yang ditetapkan oleh Sri Maharaja Rake Watukura Dyah Balitung sebagai Desa Perdikan atau daerah bebas pajak yang dipimpin oleh pejabat patih. Juga disebut-sebut Gunung Susundara dan Wukir Sumbing yang kini dikenal dengan Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing.

Begitulah Magelang, yang kemudian berkembang menjadi kota selanjutnya menjadi Ibukota Karesidenan Kedu dan juga pernah menjadi Ibukota Kabupaten Magelang. Setelah masa kemerdekaan kota ini menjadi kotapraja dan kemudian kotamadya dan di era reformasi, sejalan dengan pemberian otonomi seluas - luasnya kepada daerah, sebutan kotamadya ditiadakan dan diganti menjadi kota.

Ketika Inggris menguasai Magelang pada abad ke 18, dijadikanlah kota ini sebagai pusat pemerintahan setingkat Kabupaten dan diangkatlah Mas Ngabehi Danukromo sebagai Bupati pertama. Bupati ini pulalah yang kemudian merintis berdirinya Kota Magelang dengan membangun alun - alun, bangunan tempat tinggal Bupati serta sebuah masjid. Dalam perkembangan selanjutnya dipilihlah Magelang sebagai Ibukota Karesidenan Kedu pada tahun 1818. Setelah pemerintah Inggris ditaklukkan oleh Belanda, kedudukan Magelang semakin kuat. Oleh pemerintah Belanda, kota ini dijadikan pusat lalu lintas perekonomian. Selain itu karena letaknya yang strategis, udaranya yang nyaman serta pemandangannya yang indah Magelang kemudian dijadikan Kota Militer. Pemerintah Belanda terus melengkapi sarana dan prasarana perkotaan. Menara air minum dibangun di tengah-tengah kota pada tahun 1918, perusahaan listrik mulai beroperasi tahun 1927, dan jalan - jalan arteri diperkeras dan diaspal.

B. Pemerintah

Magelang adalah kota dingin yang menyenangkan, berjarak 40 Km utara dari Yogyakarta, dimana dikelilingi oleh beberapa pegunungan yaitu Merapi dan Merbabu sebelah Timur, Sumbing dan Sindoro sebelah Barat. Magelang adalah kota yang dilewati jalur yang menghubungkan antara Yogyakarta dan Semarang sebelah Barat sedangkan sebelah Timurnya menghubungkan antara Yogyakarta-Solo-Semarang.

Karena dikelilingi oleh gunung-gunung, keindahan Gunung Merapi terlihat ketika memuntahkan lava pijar di malam hari manakala cuaca terang, yang merupakan pesona alam yang indah. Kita menempuh perjalanan yang menyenangkan untuk menyaksikan satu dari tujuh keajaiban dunia, hasil maha karya bangsa Indonesia dimasa lalu, Candi Borobudur. Bernostalgia di kota yang sejuk ini, bekas-bekas bangunan kuno peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda yang masih terjaga kelestariannya. Di zaman Belanda, kota ini dikenal sebagai kota Garnizun Militer, banyak bangunan militer kuno di kota ini.

Gunung Tidar terletak dibagian selatan kota Magelang yang dalam legendanya disebut sebagai "Pakunya Tanah Jawa", disinilah terletak "*Kawah Candradimuka*"-nya calon perwira Angkatan Darat - Tentara Nasional Indonesia sebagai kader pemimpin bangsa dimasa depan dididik. Kawah Candradimuka itu bernama Akademi Militer (AKMIL). Gunung Tidar sendiri memiliki legenda, dimana para dewa menancapkan paku agar Pulau Jawa terhindar dari guncangan.

C. Pendidikan

Kota Magelang merupakan daerah dengan pendidikan yang paling maju di Karesidenan Kedu, bahkan di Jawa Tengah pun masih bisa eksis. Kota Magelang selalu menduduki peringkat 5 besar di Jawa Tengah dan berhasil mengalahkan daerah - daerah lain yang cukup favorit.

Di Kota Magelang terdapat sejumlah institusi pendidikan ternama, diantaranya, SMU Negeri 1 Magelang, SMP Negeri 1 Magelang yang telah menerapkan teknologi CCTV di tiap ruang kelasnya, SMP Negeri 5 Magelang sebagai salah satu Sekolah Standar Nasional, dan SMK Negeri 1 Magelang yang menjadi pusatnya WAN (Wide Area Network) di kota ini. Ada pula sekolah calon perwira TNI Angkatan Darat bernama Akademi Angkatan Darat (dahulu AKABRI); Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan alumni sekolah ini.

Perguruan tinggi swasta lainnya adalah: Universitas Muhammadiyah Magelang (termasuk Akademi Kebidanan Muhammadiyah, Akademi Keperawatan Muhammadiyah, dan Politeknik Muhammadiyah), Universitas Tidar Magelang, serta STMIK Bina Patria serta Akademi Tirta Indonesia yang merupakan akademi tirta satu - satunya di Indonesia.

D. Kesehatan

Sarana kesehatan di Kota Magelang, yang terdiri dari rumah sakit dan puskesmas, selain melayani masyarakat Kota Magelang, juga mampu melayani

masyarakat sekitar Kota Magelang. Selain itu, 184 unit posyandu sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Rumah sakit di Kota Magelang sejumlah 5 buah, yaitu: RSUD Tidar, RS Lestari Raharjo, RS Harapan, RS Islam dan RS Dr. Soedjono. Rumah sakit bersalin sejumlah 4, yaitu: RSB Budi Rahayu, RSB Gladiol, RSB Lestari Raharjo, dan RSB Bhayangkara. Selain itu terdapat 2 buah rumah sakit khusus, yaitu Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soeroyo, dan Rumah sakit Paru-paru. Puskesmas yang ada sejumlah 5 buah, yaitu Puskesmas Kedungsari, Puskesmas Jurangombo, Puskesmas Magelang, Puskesmas Cacaban dan Puskesmas Tidar.

E. Agama

Kehidupan beragama di Kota Magelang berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kerukunan antar pemeluk agama dalam menjalankan ajaran dan keyakinannya masing-masing, serta tidak pernah terjadi konflik maupun diskriminasi antara pemeluk agama tertentu. Di Kota Magelang telah terbentuk jaringan kerja antar umat beragama, melalui kelompok-kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka memperkuat hubungan sosial kemasyarakatan. Jumlah sarana ibadah mengalami peningkatan yang cukup banyak khususnya jumlah masjid yaitu 119 buah pada tahun 2003 menjadi 130 buah pada tahun 2005 dan jumlah gereja Kristen dari 24 buah menjadi 28 buah

pada tahun 2005. Hal tersebut menjadi bukti kepedulian masyarakat akan pentingnya sarana peribadatan untuk menjalankan agamanya.

F. Keadaan Geografi

Kota Magelang dengan alam pegunungannya mempunyai luas wilayah sebesar 18,12 Km², terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dengan 17 (tujuh belas) Kelurahan. Kelurahan - kelurahan tersebut yaitu:

1. Kecamatan Magelang Utara:
 - a. Kelurahan Kramat Utara
 - b. Kelurahan Kramat Selatan
 - c. Kelurahan Kedungsari
 - d. Kelurahan Wates
 - e. Kelurahan Potrobangsari
2. Kecamatan Magelang Tengah:
 - a. Kelurahan Magelang
 - b. Kelurahan Cacaban
 - c. Kelurahan Kemirirejo
 - d. Kelurahan Gelangan
 - e. Kelurahan Panjang
 - f. Kelurahan Rejowinangun Utara

3. Kecamatan Magelang Selatan :

- a. Kelurahan Tidar Utara
- b. Kelurahan Tidar Selatan
- c. Kelurahan Rejowinangun Selatan
- d. Kelurahan Magersari
- e. Kelurahan Jurangombo Utara
- f. Kelurahan Jurangombo Selatan

Kota magelang yang memiliki 3 Kecamatan dan 17 Kelurahan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Secang Kabupaten Magelang

Sebelah Timur : Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang

Sebelah Selatan : Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang

Sebelah Barat : Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang

Jumlah penduduk yang tercatat dari hasil pendataan Kantor Statistik sampai dengan bulan Desember 2006 adalah sebanyak 117.744 Jiwa. Kondisi jalan yang ada pada umumnya sudah diaspal. Letak pusat pemerintahan berada pada jalur transit antara Kota Semarang – Yogyakarta, dan ini memberikan kesempatan kepada Kota Magelang untuk meningkatkan pelayanan di bidang jasa yang akhirnya akan membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat Kota Magelang. Hal yang menguntungkan lainnya adalah letak Kota Magelang yang

berada ditengah-tengah wilayah kerja Kabupaten Magelang, sehingga banyak karyawan Pemerintah Kabupaten Magelang yang berdomisili di Kota Magelang dan tentu saja hal ini akan berpengaruh pada roda perekonomian Kota magelang.

Kotamadya Magelang 25% penduduknya adalah anak-anak, 35% usia remaja, 40% usia dewasa dengan mata pencahariannya 255 pegawai negeri/ABRI/pensiunan, 15% pengusaha, 15% buruh, 5% petani dan 405 lain-lain. Posisi Kotamadya Magelang sangat strategis karena terletak hampir ditengah Jawa Tengah dan berada dipersimpangan poros utama Yogya-Semarang, Yogya-Wonosobo, dan Semarang-Cilacap. Yogyakarta hanya 42 km dari Magelang, sementara Semarang, Ibukota Propinsi Jawa Tengah, hanya 65 km atau satu setengah jam perjalanan dengan mobil.

G. Pertanian, Perikanan, dan Peternakan

Kegiatan pertanian di Kota Magelang semakin lama semakin berkurang karena kebutuhan lahan untuk pemukiman, sehingga pada tahun 2005 luas lahan pertanian tinggal 480 Ha dengan prediksi gabah kering 2.490 ton atau setara dengan 1.693 ton beras, sedangkan untuk lahan kering luasnya ± 8 Ha ditanami palawija.

Di bidang perikanan, pada tahun 2005 budi daya perikanan air tawar cukup berkembang di Kota magelang. Kolam/empang untuk air tawar $\pm 6,68$ Ha dengan

jenis ikan karper dan lele dumbo dengan produksi rata-rata per tahun \pm 450.000 ekor.

Di bidang peternakan, karena keterbatasan lahan di kota maka peternakan tidak bisa dikembangkan. Jenis ternak yang ada pada tahun 2005 adalah sapi potong 221 ekor, domba 465 ekor, ayam ras sebanyak 152.300 ekor, ayam buras 97.971 ekor dan itik 1.891 ekor. Untuk kebutuhan daging sapi maupun ayam kekurangannya untuk masyarakat disuplai dari luar kota, sehingga rumah potong hewan Kota Magelang per tahun memotong 3.425 ekor. Untuk hal-hal tersebut diatas, maka harus ada perhatian khusus yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Kota Magelang agar dapat memperoleh akses yang memadai dan menikmati hasil dari pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Kota Magelang.

H. Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang

Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang adalah pendapatan yang diperoleh daerah Kota Magelang yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah yang digali di Kota Magelang yaitu: Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Komponen dari Pajak Daerah antara lain Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Penerangan Jalan. Dari beberapa komponen Pajak Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan komponen yang memberikan

kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar. Dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 rata-rata penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp2.112.157.375. Penerimaan terbesar terjadi pada tahun terakhir yaitu tahun 2007 yaitu sebesar Rp3.180.613.041.

Selain Pajak Daerah komponen yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Daerah. Retribusi Daerah yang dipungut di Kota Magelang antara lain Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Jasa Usaha Terminal, dan Retribusi Jasa Usaha Kekayaan Daerah. Beberapa komponen Retribusi Daerah tersebut juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar di Kota Magelang.

Dua komponen Pendapatan Asli Daerah yang lain yaitu Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dipungut di Kota Magelang antara lain diperoleh dari Perusahaan Daerah Taman Kyai Langgeng. Kemudian Penerimaan Bunga Deposito merupakan salah satu komponen dari Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dipungut di Kota Magelang selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2007.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di Pemerintah Kota Magelang ini adalah untuk mengetahui kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perkembangan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007. Data utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah daftar realisasi PPJ dan PAD pada tahun tertentu.

Data yang diperoleh dari UPPD Kota Magelang mengenai realisasi PPJ dan PAD tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 sebagai berikut:

Tabel 3. Realisasi PPJ tahun 2000 - 2007

Tahun	Realisasi PPJ
2000	Rp 796.365.065
2001	1.121.881.405
2002	1.647.499.647
2003	2.165.885.939
2004	2.510.387.643
2005	2.668.428.957
2006	2.806.197.301
2007	3.180.613.041

Sumber: Pemerintah Kota Magelang

Tabel 4. Realisasi PAD tahun 2000 - 2007

Tahun	Realisasi PAD
2000	Rp 7.373.213.960
2001	12.311.343.483
2002	18.091.243.797
2003	23.567.459.944
2004	22.628.250.565
2005	28.640.254.757
2006	36.960.394.058
2007	35.814.844.996

Sumber: Pemerintah Kota Magelang

B. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk menghitung besarnya kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi PPJ}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Perhitungan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli

Daerah setiap tahun adalah:

1. Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2000

$$= \frac{796.365.065}{7.373.213.960} \times 100\%$$

$$= 10,80\%$$

Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli

Daerah tahun 2000 sebesar 10,80%

2. Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2001

$$= \frac{1.121.881.405}{12.311.343.483} \times 100\%$$

$$= 9,11\%$$

Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2001 sebesar 9,11%

3. Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2002

$$= \frac{1.647.499.647}{18.091.243.797} \times 100\%$$

$$= 9,10\%$$

Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2002 sebesar 9,10%

4. Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2003

$$= \frac{2.165.885.939}{23.567.459.944} \times 100\%$$

$$= 9,19\%$$

Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2003 sebesar 9,19%

5. Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2004

$$= \frac{2.510.387.643}{22.628.250.565} \times 100\%$$

$$= 11,09\%$$

Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2004 sebesar 11,09%

6. Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2005

$$= \frac{2.668.428.957}{28.640.254.757} \times 100\%$$

$$= 9,31\%$$

Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2005 sebesar 9,31%

7. Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2006

$$= \frac{2.806.197.301}{36.960.394.058} \times 100\%$$

$$= 7,59\%$$

Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2006 sebesar 7,59%

8. Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2007

$$= \frac{3.180.613.041}{35.814.844.996} \times 100\%$$

$$= 8,88\%$$

Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2007 sebesar 8,88%

Tabel 5. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun Anggaran	Realisasi PPJ	Realisasi PAD	Kontribusi %
2000	Rp 796.365.065	Rp 7.373.213.960	10,80
2001	1.121.881.405	12.311.343.483	9,11
2002	1.647.499.647	18.091.243.797	9,10
2003	2.165.885.939	23.567.459.944	9,19
2004	2.510.387.643	22.628.250.565	11,09
2005	2.668.428.957	28.640.254.757	9,31
2006	2.806.197.301	36.960.394.058	7,59
2007	3.180.613.041	35.814.844.996	8,88
Rata –rata			9,383%

Sumber : Pemerintah Kota Magelang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 berkisar antara 7,59% - 11,09%. Rata-rata kontribusi yang diberikan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 adalah 9,383%.

C. Perkembangan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapat Asli

Daerah

Untuk melihat perkembangan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 digunakan analisis trend dengan metode kuadrat terkecil.

1. Perhitungan persamaan garis Trend

Tabel 6. Perhitungan trend dari kontribusi Pajak Penerangan Jalan

Tahun	Kontribusi PPJ (%)	X	XY	X ²	Y'
2000	10,80	(-7)	-75,6	49	10,153
2001	9,11	(-5)	-45,55	25	9,933
2002	9,10	(-3)	-27,3	9	9,713
2003	9,19	(-1)	-9,19	1	9,493
		0			
2004	11,09	(1)	11,09	1	9,27
2005	9,31	(3)	27,93	9	3
2006	7,59	(5)	37,95	25	9,053
2007	8,88	(7)	62,16	49	8,833
					8,613
TTL	75,07	0	-18,51	168	

Perhitungan persamaan trend $Y' = a + bX$ dengan dua persamaan

$$SY = Na + bSX$$

$$75,07 = 8a + 0$$

$$a = 9,383$$

$$SXY = aSX + bSX^2$$

$$-18,51 = 0 + 168b$$

$$b = -0,11$$

$$\text{Jadi } Y' = 9,383 - 0,11X$$

2. Untuk mengetahui apakah nilai b signifikan atau tidak, perlu dilakukan uji “t”

pada taraf nyata 5%. Hipotesis dan perhitungannya sebagai berikut:

a. Hipotesis nihil, $H_0: b = 0$; berarti tidak ada perkembangan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hipotesis alternatif, $H_1: b \neq 0$; berarti ada perkembangan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

b. $Y' = 9,383 - 0,11X$

c. Diket :

$$b = -0,11$$

$$t \text{ tabel} = 2,447$$

$$\alpha = 5\%$$

$$N = 8$$

$$t_{\frac{1}{2} \alpha} = t_{0,025} = t \text{ tabel}$$

$$\bar{X} = 0$$

Tabel 7. Perhitungan uji “t”

Y	X	Y'	(Y-Y')	(Y-Y') ²	(X- \bar{X})	(X- \bar{X}) ²
10,80	-7	10,153	0,647	0,418609	-7	49
9,11	-5	9,933	-0,823	0,677329	-5	25
9,10	-3	9,713	-0,613	0,375769	-3	9
9,19	-1	9,493	-0,303	0,091809	-1	1
	0					
11,09	1	9,273	1,817	3,301489	1	1
9,31	3	9,053	0,257	0,066049	3	9
7,59	5	8,833	-1,243	1,545049	5	25
8,88	7	8,613	0,267	0,071289	7	49
	S0			6,547392	S0	S168

$$d. \quad S_e^2 = \frac{S(Y - Y')^2}{(N - 2)}$$

$$S_e^2 = \frac{6,547392}{6}$$

$$= 1,091232$$

$$S_b^2 = \frac{S_e^2}{S(X - \bar{X})^2}$$

$$S_b^2 = \frac{1,091232}{168}$$

$$= 0,0065$$

$$S_b = 0,08$$

$$t = \frac{b}{S_b}$$

$$t = \frac{-0,11}{0,08}$$

$$= -1,375$$

$$T \text{ table} = t(a/2; n-2)$$

$$= 0.025; 8-2$$

$$= 2,447$$

- e. Daerah penerimaan dan penolakan H_0

Gambar 2: Daerah penerimaan dan penolakan H_0

- f. Kesimpulan: H_0 diterima, ini berarti tidak ada perkembangan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang signifikan. Perhitungan uji “t” menghasilkan nilai t hitung sebesar -1,375 dan nilai t tabel dengan taraf nyata 5% didapat sebesar 2,447 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada perkembangan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang signifikan.

D. Pembahasan

1. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 berkisar antara 7,59% - 11,09%. Dari tabel 3, realisasi Pajak Penerangan Jalan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 selalu mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa penyebab, yaitu adanya peningkatan pelanggan, mutasi penggunaan listrik, dan adanya kenaikan tarif dasar listrik.

Pada tahun 2000 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 10,80%. Tetapi pada tahun 2001 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah yang cukup tinggi. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah tidak hanya dipengaruhi oleh Penerimaan Pajak Penerangan Jalan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh komponen-komponen yang lain. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2001 disebabkan karena dari semua komponen Pendapatan Asli Daerah hanya 4 komponen saja yang mengalami penurunan, kemudian dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan baru maka komponen Pendapatan Asli Daerah bertambah, dan terdapat beberapa PAD yang mengalami kenaikan. Empat komponen yang mengalami penurunan yaitu pos Denda Pajak, pos Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, pos Badan Kredit Kecamatan, dan pos Hasil penjualan barang milik daerah. Komponen PAD

yang bertambah adalah pos Pajak Parkir, Bagian laba SHU Koperasi dan TPTGR. Kemudian beberapa pos yang peningkatannya cukup tinggi yaitu pos Retribusi Pelayanan Kesehatan, Penerimaan lain-lain, Jasa Giro, Perusahaan Daerah Kyai Langgeng, dan Pajak Penerangan Jalan.

Pada tahun 2002 Pajak Penerangan Jalan memberikan kontribusi sebesar 9,10%. Di tahun ini Pendapatan Asli Daerah juga mengalami peningkatan bahkan peningkatannya lebih tinggi dari tahun 2001. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di tahun 2002 disebabkan karena adanya beberapa komponen PAD yang baru dan adanya beberapa pos PAD yang naik. Munculnya beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah disebabkan karena adanya peraturan perundang-undangan yang baru. Komponen tersebut antara lain, pos Pajak Sarang Burung, pos Retribusi Ijin Ketenagakerjaan dan pos Retribusi Tempat Khusus Parkir. Lalu beberapa pos PAD yang naik yaitu pos Retribusi Pelayanan Kesehatan, Penerimaan lain-lain, Jasa Giro, dan Pajak Penerangan Jalan.

Kemudian pada tahun 2003 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 0,09% sehingga kontribusinya menjadi 9,19%. Penyebab kenaikan kontribusi ini yaitu adanya kenaikan realisasi Pajak Penerangan Jalan dan kenaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi 4 pos yang memberikan penerimaan cukup tinggi yaitu pos Retribusi Pelayanan

Kesehatan, Penerimaan bunga deposito dan Penerimaan lain-lain dan Pajak Penerangan Jalan.

Pada tahun 2004 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan peningkatan di tahun 2003. Peningkatan kontribusi yang terjadi ditahun 2004 yaitu sebesar 1,9% sehingga peningkatannya menjadi 11,09%. Peningkatan kontribusi yang terjadi pada tahun 2004 disebabkan karena kenaikan realisasi Pajak Penerangan Jalan yang diikuti dengan penurunan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Penurunan realisasi PAD disebabkan oleh banyaknya komponen PAD yang mengalami penurunan, antara lain pada pos Penerimaan lain-lain, Jasa Giro dan Penerimaan Bunga Deposito . Penurunan terbesar terjadi pada pos Penerimaan lain-lain yaitu sebesar Rp 3.013.995.959.

Di tahun 2005 kontribusi Pajak Penerangan Jalan mengalami penurunan menjadi 9,31%. Pada tahun ini realisasi Pendapatan Asli Daerah kenaikannya cukup tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu adanya beberapa pos yang mengalami peningkatan kembali. Terdapat 3 pos yang peningkatannya besar yaitu pos Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp 1.447.569.500, Penerimaan lain-lain sebesar Rp 1.235.373.800 dan pos Bagian Laba Lembaga Keuangan Daerah sebesar Rp 1.664.435.646.

Untuk tahun 2006 kontribusi Pajak Penerangan Jalan juga mengalami penurunan, namun realisasi Pendapatan Asli Daerah naik cukup tinggi bahkan

dapat dikatakan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 realisasi Pendapatan Asli Daerah paling tinggi adalah tahun 2006. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah ini dipengaruhi oleh adanya 4 pos yang peningkatannya cukup besar. Empat komponen tersebut adalah pos Retribusi Pelayanan Kesehatan (RSU) sebesar Rp 2.186.158.770, Jasa Giro sebesar Rp 1.656.224.916, Penerimaan Bunga Deposito sebesar Rp 2.890.471.789, dan Penerimaan lain-lain sebesar Rp 1.987.616.675. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2006 mengalami penurunan menjadi 7,59%.

Pada tahun 2007 kontribusi yang diberikan oleh Pajak Penerangan Jalan mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan adanya kenaikan realisasi Pajak Penerangan Jalan tetapi realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan. Penurunan Pendapatan Asli Daerah yang terjadi di tahun 2007 dipengaruhi oleh banyaknya komponen Pendapatan Asli Daerah yang mengalami penurunan. Penurunan terbesar ada pada pos Penerimaan lain-lain sebesar Rp 3.015.709.646 dan pos Penerimaan Bunga Deposito sebesar Rp 2.211.948.245.

Rata-rata kontribusi yang diberikan Pajak penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 adalah 9,383%. Sedangkan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah terbesar terjadi pada tahun 2004 dengan kontribusi 11,09% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2006 dengan kontribusi 7,59%. Dengan

demikian Pajak Penerangan Jalan yang dipungut Pemerintah Kota Magelang mempunyai kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Perkembangan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil analisis data dengan menggunakan analisis trend diperoleh persamaan $Y' = 9,383 - 0,11X$. Persamaan ini menunjukkan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang pada akhir tahun 2003/awal tahun 2004 atau nilai “Y” apabila X sama dengan 0 (nol) sebesar 9,383% sedangkan nilai “b” sebesar -0,11% merupakan perubahan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah per enam (6) bulan secara berkala.

Langkah selanjutnya adalah melakukan uji “t”. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai b signifikan atau tidak, pada taraf nyata 5%. Taraf nyata 5% menjelaskan bahwa dengan taraf nyata 5% peneliti yakin bahwa tingkat keyakinan dari kesimpulan yang diperoleh yaitu tidak ada perkembangan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 95%, sedangkan tingkat keyakinan bahwa ada perkembangan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 5%. Hasil uji signifikansi menggunakan pengujian statistik uji t untuk mengetahui apakah nilai “b” signifikan atau tidak, menunjukkan bahwa $t_{hitung} -1,375 < t_{tabel} 2,447$. Hasil t hitung tersebut terletak di daerah

penerimaan H_0 , maka hasil ini membuktikan bahwa tidak ada perkembangan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang signifikan di Kota Magelang dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 berkisar antara 7,59% sampai dengan 11,09%. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang terkecil terjadi pada tahun 2002 dengan kontribusi 9,10% sedangkan kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2004 dengan kontribusi 11,09%.
2. Hasil analisis data dengan menggunakan analisis trend diperoleh persamaan $Y' = 9,383 - 0,11X$. Hasil uji signifikansi menggunakan pengujian statistik uji t untuk mengetahui apakah nilai “b” signifikan atau tidak, menunjukkan bahwa t hitung $-1,375 < t$ tabel $2,447$. Hasil t hitung tersebut terletak di daerah penerimaan H_0 , maka hasil ini membuktikan bahwa tidak ada perkembangan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang signifikan di Kota Magelang pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2007.

B. Keterbatasan penelitian

Dalam melakukan penelitian tentu saja penulis menghadapi keterbatasan dalam penelitian, yaitu:

1. Penulis membandingkan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah hanya delapan tahun saja yaitu tahun 2000 sampai dengan tahun 2007.
2. Dalam penelitian ini penulis hanya membahas Pajak Penerangan Jalan saja sehingga tidak dibahas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lain.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mempunyai beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Magelang, dari hasil penelitian yang peneliti lakukan ternyata tidak ada perkembangan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah, oleh karena itu Pemerintah Kota Magelang diharapkan tidak hanya mengandalkan penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan saja tetapi dapat terus menggali Pendapatan Asli Daerah dari komponen-komponen yang lain, seperti Jasa Giro dan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2. Bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti topik tentang Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebaiknya rentang waktu yang digunakan lebih lama, hal ini bertujuan untuk menghasilkan hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari, 2000. *Analisis Regresi Teori, Kasus, dan Solusi*. Yogyakarta: BPFE
- Asa, Yasinta Yudita Abanit. 2004. *Analisis Efisiensi Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Sanata Dharma
- Boedijoewono, Noegroho. *Pengantar Statistik Ekonomi dan Bisnis*. Edisi Keempat. Jilid 1 dan 2. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Haning, Dedy dan Radianto, Wirawan Endro Dwi. 2005. Analisis Potensi Pajak Daerah Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Riset dan Keuangan*: vol,1. No.1, hal 66-77
- Kuncoro, Antonius. 2005. *Kontribusi retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Sanata Dharma
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset
- Peraturan Daerah Kota Magelang No. 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang No. 9 Tahun 2000 Tentang Pajak Penerangan Jalan
- Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press
- Republik Indonesia, Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2005. *Undang-Undang Otonomi Daerah 2004*. Bandung: Citra Umbara
- Republik Inodesia, Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 2005. *Undang-Undang Otonomi Daerah 2004*. Bandung: Citra Umbara
- Republik Indonesia, Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 2005. *Undang-Undang Otonomi Daerah 2004*. Bandung: Citra Umbara

- Subagyo, Pangestu dan Djarwanto. 2005. *Statistika Induktif*. Yogyakarta: BPFE
- Supramono. 2003. Posisi Pajak Dan Retribusi Sebagai Sumber Penerimaan Daerah Di Kota Semarang. *Jurnal Studi Pembangunan*: Vol. xv. No.1, hal 37-54
- Supramono dan Soeratno. 2002. Urgensi Pajak Daerah Dan Penghasilan Daerah Dalam Struktur Pendapatan Asli Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen STIE YKPN*
- Zain, Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

LAMPIRAN I

Data realisasi Pajak Penerangan Jalan
dan realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2000 - 2007

DATA REALISASI PAJAK PENERANGAN JALAN TAHUN 2000 - 2007

Tahun	Realisasi PPJ
2000	Rp 796.365.065
2001	1.121.881.405
2002	1.647.499.647
2003	2.165.885.939
2004	2.510.387.643
2005	2.668.428.957
2006	2.806.197.301
2007	3.180.613.041

Sumber: Pemerintah Kota Magelang

DATA REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2000 - 2007

Tahun	Realisasi PAD
2000	Rp 7.373.213.960
2001	12.311.343.483
2002	18.091.243.797
2003	23.567.459.944
2004	22.628.250.565
2005	28.640.254.757
2006	36.960.394.058
2007	35.814.844.996

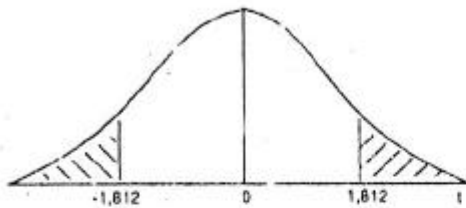
Sumber: Pemerintah Kota Magelang

LAMPIRAN 2

Tabel Distribusi Nilai t

TABEL DISTRIBUSI NILAI T

Tabel titik persentasi distribusi nilai t



Bagi d.f. = 10 derajat bebas

$$P(t > 1.812) = 0.05$$

$$P(t < -1.812) = 0.05$$

α d.f.	.25	.20	.15	.10	.05	.025	.010	.005	.0005
1	1.000	1.378	1.963	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	636.619
2	.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	31.598
3	.765	.978	1.250	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	12.941
4	.741	.941	1.190	1.533	2.132	2.778	3.747	4.604	8.610
5	.727	.920	1.156	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	6.859
6	.718	.906	1.134	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.959
7	.711	.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.981	3.499	5.405
8	.706	.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.898	3.355	5.041
9	.703	.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.821	3.230	4.781
10	.700	.879	1.093	1.371	1.812	2.228	2.764	3.169	4.587
11	.697	.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.437
12	.695	.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	4.318
13	.694	.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	4.221
14	.692	.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	4.140
15	.691	.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	4.073
16	.690	.865	1.071	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	4.015
17	.689	.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.965
18	.688	.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.922
19	.688	.861	1.066	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.883
20	.687	.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.850
21	.686	.859	1.063	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.819
22	.686	.858	1.061	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.792
23	.685	.858	1.060	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.767
24	.685	.857	1.059	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.745
25	.684	.856	1.058	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.723
26	.684	.856	1.058	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.707
27	.684	.855	1.057	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.690
28	.683	.855	1.056	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.674
29	.683	.854	1.055	1.311	1.699	2.045	2.462	2.753	3.659
30	.683	.854	1.055	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.646
40	.681	.851	1.050	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.551
60	.679	.845	1.046	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.460
120	.677	.843	1.041	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	3.373
∞	.674	.842	1.038	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.291

Sumber: Fisher and Yates, *Statistical Tables for Biological, Agricultural, and Medical Research*, Table JI, Izin Penerbit Oliver and Boyd, Ltd. Edinburgh, England.

LAMPIRAN 3

Surat Bukti Penelitian



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH (DPKKD)

Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 P.O. Box. : 7 Telp. (0293) 363530, 363695 (5 lines)
Fax. (0293) 364910 Telex. 22716 kod mgl IA MAGELANG 56101

SURAT KETERANGAN

Nomer : 070 / 636.6 / 290

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi-USD Yk Nomor: 31/Kaprodi
Akt/185/XI/2007 tanggal 16 November 2007 tentang Ijin Penelitian.

Dengan ini kami :

Nama : Drs. Agus Abdurachim
Jabatan : Ka. Bag. Tata Usaha DPKKD Kota Magelang
Menerangkan bahwa:
Nama : Aprilia Wulansari
NIM : 032114092
Jurusan : Akuntansi
Program : S1 Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Mangunan RT: 02 RW: 03 Mertoyudan Magelang

Telah selesai melaksanakan Penelitian di Dinas Pengelolaan Keuangan Dan
Kekayaan Daerah Kota Magelang mulai dari bulan Juni s/d bulan Juli 2008.
Demikian untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Magelang, 1 Agustus 2008

AN. KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN KEKAYAAN DAERAH KOTA MAGELANG
Ka. Bag. Tata Usaha



Drs. AGUS ABDURACHIM
Pembina TK. I
NIP. 500 081 833